
Pengujian Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel PemoderasiArini Syafaah^a, Niswah Baroroh^b^{a,b}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Gedung L, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia
arinisyafaah4@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Laporan keuangan setiap tahunnya direview oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan masih menemukan banyak fenomena laporan keuangan yang tidak menyajikan data sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan. Pada tahun 2019, BPK mengungkapkan 6.160 temuan dengan 10.499 isu, sedangkan pada 2020 BPK mengungkapkan 6.809 temuan dengan 11.662 isu. Data primer digunakan dalam penelitian ini yang dikumpulkan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni pegawai di bidang akuntansi dan keuangan yang berjumlah 230 orang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Pemilihan sampel dilakukan secara *random sampling*, sehingga diperoleh 89 pegawai akuntansi/keuangan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini merupakan persepsi pegawai yang bekerja di bidang akuntansi/keuangan dengan perwakilan dari beberapa OPD. Riset ini menghasilkan SAP, efektivitas SPI, dan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM mampu memperkuat hubungan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan, namun tidak mampu memperkuat pengaruh SAP dan efektivitas SPI terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: *Good Governance*; Kompetensi SDM; Kualitas Laporan Keuangan; Standar Akuntansi Pemerintahan; Sistem Pengendalian Internal

*Testing the Quality of Financial Reports with Human Resource Competence as a Moderating Variable***ABSTRACT**

Regional government financial reports are assessed annually by the Financial Supervisory Agency (BPK). BPK in carrying out audits of financial statements still finds many phenomena of financial statements that do not present data in accordance with regulations and there are still many irregularities. In 2019 BPK revealed 6,160 findings with 10,499 issues, while in 2020 BPK revealed 6,809 findings with 11,662 issues. The primary data used in this study were collected by survey method by distributing questionnaires. The population used in this study were all employees in the accounting and finance fields, totaling 230 people in the Tegal Regency Government. The sample selection was done by random sampling, in order to obtain 89 accounting/finance employees as the research sample. This study is the perception of employees who work in the accounting/finance sector with representatives from several OPDs. This study resulted in government accounting standards, internal control systems, and good governance have a positive effect on the quality of financial reports. HR competencies are able to moderate good governance on the quality of financial reports, but have not been able to moderate the influence of GAS and ICS on the quality of financial reports.

Keywords: *Government Accounting Standards; Good Governance; HR Competence; Internal Control System; Quality of Financial Reports*

PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, pemerintah dituntut oleh masyarakat agar meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan (Septarini & Papiyaya, 2016). Berlandaskan Pasal 10 ayat (3) huruf g UU No 17 Tahun 2003, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran daerah memiliki fungsi menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Pemerintah daerah menjadikan laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi, politik, sosial dan sebagai penilaian akuntabilitas. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, dalam menyusun LKPD termuat karakteristik kualitatif agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Setiap tahunnya LKPD dinilai oleh BPK. Saat pelaksanaan penilaian laporan keuangan, BPK masih menemukan banyaknya fenomena LKPD yang belum menampilkan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyelewengan (Sholohah *et al.*, 2019). Pada tahun 2019 BPK mengungkapkan 6.160 temuan, termasuk 10.499 isu persoalan yang terdiri dari 5.175 isu SPI dan 5.324 isu ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dengan ketentuan regulasi sebesar Rp 1,52 triliun (BPK RI, 2020). Sedangkan pada tahun 2020 BPK mengungkapkan 6.809 temuan, termasuk 11.662 isu persoalan yang terdiri dari 5.367 isu SPI dan 6.295 ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dengan ketentuan regulasi sebesar Rp 2,07 triliun (BPK RI, 2021).

Lima tahun terakhir, Kabupaten Tegal memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan dari tahun 2016-2020 (Radartegal.com, 2021). Saat BPK mengeluarkan opini WTP dapat diartikan laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria atau syarat yang dapat diartikan bahwa laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan dengan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun, menurut Ismayatun (anggota V BPK RI), mendapatkan opini WTP tidak secara langsung menjadi jaminan tidak adanya penyelewengan, pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan dan ketidakpatuhan (Redaksi, 2018).

Pada Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat permasalahan mengenai SPI yang belum terealisasi di seluruh OPD. Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan aktivitas pengendalian sesuai dengan standar, kompleksitas, dan karakter dari tugas dan kewajiban instansi itu sendiri (Widya, 2017). Selain itu, laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK tidak rutin dipublikasi pada *website* resmi pemerintah daerah. Informasi keuangan terakhir kali dipublikasi pada tahun 2018, sedangkan ditahun 2019 hanya mempublikasi peraturan daerah dan peraturan bupati mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal 2019 (BPKAD, 2022). Mulai dari tahun 2019-2021 tidak ada publikasi mengenai informasi laporan keuangan. Dalam hal ini dapat diartikan kurangnya transparansi pengelolaan anggaran daerah pemerintah Kabupaten Tegal.

Stewardship theory merupakan teori yang mendasari pada penelitian ini. Teori ini dirancang untuk para peneliti untuk menguji situasi dimana para pemangku kepentingan dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk melangkah dengan cara terbaik bagi *principal* (Donaldson & Davis, 1991). Konsep teori *stewardship* mengasumsikan bahwa pertanggungjawaban *steward* kepada *principal* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah sendiri dapat dilakukan dengan cara menyusun dan melaporkan aktivitas pengelolaan keuangannya yang tercermin dari sebuah laporan keuangan yang berkualitas yang disusun berdasarkan SAP. Pemerintah sebagai *steward* memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat (*principal*) melalui penyajian informasi keuangan yang bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menciptakan kinerja keuangan yang baik dan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan juga dapat diwujudkan melalui *good governance*, dimana pemerintah termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi sehingga dapat memperkuat kepuasan masyarakat (Aryanti & Wahyuningrum, 2019).

Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh SAP, efektivitas SPI, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi SDM sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti membatasi masalah terhadap variabel dan objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Penelitian ini memilih OPD Kabupaten Tegal sebagai objek penelitian karena OPD merupakan lembaga pemerintah yang berperan dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahan di daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori *stewardship* pertama kali dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menjelaskan situasi dimana manajemen tidak terdorong oleh tujuan atau kepentingan individu, melainkan terdorong oleh hasil primer untuk relevansi organisasi. Teori *stewardship* menjelaskan kehadiran pemerintah sebagai institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat agar berperan selaras dengan tugas dan fungsi, memberikan pertanggungjawaban keuangan sebagai tujuan pelayanan publik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana secara maksimum (Jannah, 2016). Pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan seluruh kemampuan dan keahliannya sehingga dapat mengelola keuangan dan merealisasi anggaran dengan baik serta mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas terhadap masyarakat. Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah berperan sebagai *steward* yaitu dalam teori ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi laporan keuangan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan yaitu masyarakat dan pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan (Stirilita & Andayani, 2021).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas didefinisikan dengan informasi keuangan yang ditampilkan pada laporan keuangan telah disusun dengan baik dan benar selaras dengan standar akuntansi sehingga dapat mengerti oleh pengguna informasi laporan keuangan tersebut (Ikriyati & Aprila, 2019). Kualitas laporan keuangan merupakan kapabilitas informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan mampu dimengerti dan digunakan sebagai pengambilan keputusan yang terbebas dari pengertian menyimpang, kesalahan material, dan dapat diandalkan (Defitri, 2018). Untuk mewujudkan informasi keuangan yang berkualitas diperlukan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang ditunjukkan. Karakteristik kualitatif yang terdapat dalam PP No. 71 Tahun 2010 sebagai indikator pengukuran kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengembangan Hipotesis

Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SAP merupakan prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian LKPD dan LKPP (Arza *et al.*, 2021). PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi acuan dalam pelaksanaan SAP (Sholohah *et al.*, 2019). Penerapan SAP yang sudah sesuai dalam tujuan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah penentu kualitas laporan keuangan yang dicapai (Jannah, 2016). Untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, dalam menyusun laporan keuangan seluruh OPD harus berpatokan pada SAP. Hal tersebut wajib dilakukan agar informasi keuangan yang diciptakan dapat memuat informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan seperti pengguna informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan. Menurut Aswar *et al.* (2021), Philadhelphia *et al.* (2020), dan Stirilita dan Andayani (2021) SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal karena sistem akuntansi selaku sistem informasi merupakan topik yang sering mengalami permasalahan baik disengaja maupun tidak (Husna *et al.*, 2017). Penerapan SPI diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dari seluruh kegiatan sehingga akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Apabila SPI dapat dilaksanakan dengan efektif dan penuh dengan tanggung jawab, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena setiap aspeknya terdapat pengendalian yang berkualitas pula. Pemerintah sebagai *steward* memiliki kewajiban

untuk melayani masyarakat (*principal*) melalui penyajian informasi keuangan yang bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas. Dewi *et al.* (2019) dan Aswar *et al.* (2021) dalam risetnya mengungkapkan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga diperoleh hipotesis seperti berikut:

H2: SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Terlaksananya *good governance* merupakan faktor primer dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pemberian pelayanan publik yang baik. *Good governance* digunakan oleh perangkat daerah untuk menjadi acuan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang kinerjanya dapat dipercaya oleh masyarakat (Philadelphina *et al.*, 2020). Melalui *good governance* maka akan menciptakan kinerja bagian keuangan yang baik, sehingga akan mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Dapat ditarik kesimpulan yaitu apabila pemerintah dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik, maka kualitas laporan keuangan yang diciptakan akan semakin baik pula. Hal ini juga akan berdampak pada saat pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK bahwa semakin baik dan berkualitasnya suatu laporan maka akan menciptakan opini WTP. Penelitian ini didukung oleh Philadelphina *et al.* (2020) dan Maramis *et al.* (2018) yang menyatakan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3: Good governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi SDM memoderasi SAP, Efektivitas SPI, dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi SDM didefinisikan dengan keahlian SDM yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan dan kewajiban yang telah dipercayakan dengan pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang kompeten (Sumaryati *et al.*, 2020). Dewi & Hoesada (2020) berpendapat kompetensi SDM merupakan kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang berpengaruh langsung terhadap kinerja. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki SDM yang berkualitas dan berkompeten seperti pengetahuan, ketrampilan, dan sikap merupakan tiga aspek utama dalam kompetensi SDM. Pengelolaan keuangan akan berjalan dengan lancar apabila tiap-tiap aparatur pemerintah mempunyai kompetensi untuk mendukung aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk menginterpretasikan dan merealisasikan standar akuntansi dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan dapat didukung oleh kompetensi SDM, karena SAP merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian OPD yang telah menerapkan SPI yang efektif dalam lingkungan organisasi yang memiliki tingkat kompetensi tinggi, maka laporan keuangan dapat disusun secara benar, tepat waktu, tepat sasaran, dan mengacu pada standar laporan keuangan sehingga akan menciptakan LKPD yang berkualitas. Penerapan *good governance* dalam sektor publik juga diharapkan dapat menciptakan LKPD yang berkualitas serta bebas dari kesalahan penyampaian yang tidak sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan dan terbebas dari kesalahan interpretasi.

H4: Kompetensi SDM memoderasi pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan

H5: Kompetensi SDM memoderasi pengaruh efektivitas SPI terhadap kualitas laporan keuangan

H6: Kompetensi SDM memoderasi pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *hypothesis testing study*. Jenis data ini merupakan data primer yang dikumpulkan menggunakan metode survei dengan membagikan kuesioner kepada sampel terpilih. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang akuntansi dan keuangan yang berjumlah 230 orang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Pemilihan sampel dilakukan dengan *random sampling*, sehingga diperoleh 89 pegawai akuntansi/keuangan sebagai

sampel penelitian. Perlu digaris bawahi, penelitian ini merupakan persepsi pegawai yang bekerja dibidang akuntansi/keuangan dengan perwakilan dari beberapa OPD. Responden yang telah dipilih tersebut dinilai memadai karena memiliki kapabilitas dalam keterlibatan secara langsung dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Model pengukuran dilakukan menggunakan skala *likert* lima poin, dengan skor terendah 1 sampai skor tertinggi 5. Skala *likert* menyajikan jawaban yang dikategorikan seperti (1) STS: sangat tidak setuju; (2) TS: tidak setuju; (3) RR: ragu-ragu; (4) S: setuju; (5) SS: sangat setuju. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) dengan program SmartPLS 3.0 digunakan sebagai alat bantu pengolahan data. Model PLS-SEM cocok digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel minim. Model ini memiliki keunggulan informasi yang dihasilkan lebih efisien dan mudah diinterpretasikan dan tidak mensyaratkan asumsi normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas (Abdilah & Hartono, 2015).

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Variabel

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviatoin
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	89	44	70	59.42	6.394
SAP (X1)	89	28	45	38.36	4.328
Efektivitas SPI (X2)	89	50	80	66.47	7.370
<i>Good Governance</i> (X3)	89	48	75	63.36	6.796
Kompetensi SDM (Z)	89	32	50	40.79	4.489

Sumber: Data primer yang diolah (2022)

Melihat tabel 1, kualitas laporan keuangan memperoleh *mean* sebesar 59.42 dengan kriteria “sangat baik” sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Variabel SAP diperoleh nilai *mean* 38,36 dengan kriteria “sangat baik”, sehingga dapat disimpulkan penerapan SAP dalam penyusunan dan pelaporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sudah sangat baik. Selanjutnya variabel efektivitas SPI diperoleh nilai *mean* 66,47 dengan kriteria “baik”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dianggap mampu menerapkan SPI dalam penyusunan dan pelaporan keuangan dengan baik. Kemudian variabel *good governance* memperoleh nilai *mean* 63,36 dengan kriteria “sangat baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan sangat baik. Variabel kompetensi SDM mendapatkan nilai *mean* 40,79 dengan kriteria “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sudah baik.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Average Variance Extracted (AVE)
Kualitas laporan keuangan (Y)	0.957	0.952	0.615
SAP (X1)	0.946	0.936	0.659
Efektivitas SPI (X2)	0.971	0.968	0.674
Good Governance (X3)	0.967	0.963	0.659
Kompetensi SDM (Z)	0.937	0.928	0.600

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Uji validitas dan reliabilitas sudah memenuhi indikator yang ditetapkan. Suatu indikator disebut reliabel ketika memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 yang berarti mempunyai reliabilitas tinggi. Akan tetapi jika nilainya 0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2014). *Cronbach's alpha* berfungsi sebagai penguat hasil *composite reliability* yang sebelumnya sudah diketahui. Apabila nilai *alpha* lebih dari 0,7 maka dapat dimaknai bahwa kualitas reliabilitas cukup, lalu jika nilai *alpha* lebih dari 0,8 berarti informasi seluruh indikator reliabel dan seluruh pertanyaan memiliki reliabilitas yang andal secara akurat. Kemudian jika nilai *alpha* lebih dari 0,9 artinya reliabilitas ideal (Ghozali, 2014). *Average Variance Extracted* (AVE) dikatakan akurat jika nilainya diatas 0,5 (Ghozali, 2014). Dilihat dari tabel 2 maka data yang digunakan dalam riset ini sudah memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas.

R-Square

Tabel 3. R-Square

Variabel	R-Square
Kualitas Laporan Keuangan	0.510

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Nilai R-Square dalam penelitian ini sebesar 0,510 yang dapat diartikan variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel SAP, efektivitas SPI, *good governance*, dan kompetensi SDM sebesar 51% sedangkan sisanya 49% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Path Coefficients

Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Ket.	
X1 -> Y	0.179	0.197	0.098	1.824	0.034	Diterima
X1*Z -> Y	-0.128	-0.133	0.089	1.439	0.075	Ditolak
X2 -> Y	0.368	0.367	0.096	3.840	0.000	Diterima
X2*Z -> Y	-0.098	-0.087	0.109	0.899	0.184	Ditolak
X3 -> Y	0.241	0.229	0.129	1.866	0.031	Diterima
X3*Z -> Y	0.273	0.275	0.165	1.662	0.049	Diterima

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian hipotesis yang didapatkan dari nilai *path coefficient* dapat menjelaskan hubungan antar variabel sebagai berikut:

Nilai *original sample* dari variabel SAP (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,179 yang berarti hubungan tersebut positif. Penelitian ini menemukan bukti bahwa kualitas laporan keuangan akan semakin baik jika pemerintah menyampaikan dan mematuhi seluruh kewajiban pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan yang tercermin dalam SAP. Kemudian nilai signifikansi dapat dilihat dari *p-values* $0,034 < 0,05$ dan *t-statistik* $1,824 > 1,64$, dengan demikian **H1 diterima**. Nilai *original sample* dari variabel efektivitas SPI (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,368 yang berarti hubungan tersebut positif. Penelitian ini menemukan bukti bahwa penerapan SPI yang efektif akan mengurangi kekeliruan dan penyimpangan sehingga laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif (Septarini & Papilaya, 2016). Kemudian nilai signifikansi dapat dilihat dari *p-values* $0,000 < 0,05$ dan *t-statistik* $3,840 > 1,64$, dengan demikian **H2 diterima**. Nilai *original sample* dari variabel *good governance* (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,241 yang berarti hubungan tersebut positif. Penelitian ini menemukan bukti bahwa OPD yang sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan menciptakan kinerja keuangan yang baik sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kemudian nilai signifikansi dapat dilihat dari *p-values* $0,031 < 0,05$ dan *t-statistik* $1,866 > 1,64$, dengan demikian **H3 diterima**.

Nilai *original sample* dari variabel SAP (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) yang dimoderasi oleh kompetensi SDM (Z) sebesar -0,128 yang berarti hubungan tersebut negatif. Kemudian nilai signifikansi dapat dilihat dari *p-values* $0,075 > 0,05$ dan *t-statistik* $1,439 < 1,64$. Dengan demikian kompetensi SDM dalam penelitian ini tidak terbukti dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh keduanya, sehingga **H4 ditolak**. Nilai *original sample* dari variabel efektivitas SPI (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) yang dimoderasi oleh kompetensi SDM (Z) sebesar -0,098 yang berarti hubungan tersebut negatif. Kemudian nilai signifikansi dapat dilihat dari *p-values* $0,184 > 0,05$ dan *t-statistik* $0,899 < 1,64$. Dengan demikian kompetensi SDM dalam penelitian ini tidak terbukti dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh keduanya, sehingga **H5 ditolak**. Nilai *original sample* dari variabel *good governance* (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) yang dimoderasi oleh kompetensi SDM (Z) sebesar 0,273 yang berarti hubungan tersebut positif. Kemudian nilai signifikansi dapat dilihat dari *p-values* $0,049 > 0,05$ dan *t-statistik* $1,662 > 1,64$. Dengan demikian kompetensi SDM dalam penelitian ini terbukti dapat memoderasi pengaruh keduanya, sehingga **H6 diterima**.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian yang dilaksanakan pada pegawai akuntansi/keuangan di OPD Kabupaten Tegal menghasilkan adanya pengaruh positif signifikan antara SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berarti kualitas laporan keuangan akan semakin baik apabila pemerintah menyampaikan dan mematuhi seluruh kewajiban pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan yang tercermin dalam SAP. Hasil pengolahan data menunjukkan pada OPD Kabupaten Tegal sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan UU No 71 Tahun 2010. Penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban bagi setiap OPD. Hal tersebut sejalan dengan teori *stewardship* yaitu pemerintah selaku *steward* sudah bertanggung jawab kepada *principal* dalam menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah sendiri dengan cara menyusun dan melaporkan aktivitas pengelolaan keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan yang berkualitas (Farikhoh & Kusmuriyanto, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswar *et al.* (2021), Stirilita dan Andayani (2021), dan Philadelphia *et al.* (2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yaya dan

Pawestri (2020) dan Handayani *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan Dewi dan Hoesada (2020) dan Sholohah *et al.* (2019) yang menghasilkan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan SPI yang efektif akan menekan kesalahan dan penyimpangan yang terjadi, sehingga laporan keuangan yang diciptakan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Septarini & Papilaya, 2016). Apabila pengendalian internal berjalan dengan baik, maka prosedur akuntansi dapat mudah dikendalikan, diawasi, dan dihindari apabila terdapat kecurangan, sehingga laporan keuangan dapat tersaji dengan informasi keuangan yang andal. OPD Kabupaten Tegal telah melakukan komunikasi secara terbuka dengan rekan, masyarakat, dan aparat pengawas internal untuk memberikan saran yang signifikan. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yakni pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani *principal* untuk memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini searah dengan peneliti Aswar *et al.* (2021), Dewi dan Hoesada (2020), dan Dewi *et al.* (2019). Namun penelitian ini berbeda dengan peneliti Yaya dan Pawestri (2020) dan Hendri dan Amelia (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif pada efektivitas SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumaryati *et al.* (2020) dan Philadelphia *et al.* (2020) menyatakan efektivitas SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah yang sudah mengaplikasikan prinsip-prinsip *good governance* secara maksimal akan melahirkan pemerintahan yang berjalan lebih baik, termasuk pengolahan keuangan daerah dan informasi keuangan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada publik (Pramita & Dharma, 2018). Pemerintah didesak untuk melahirkan tata kelola keuangan yang bersih dan baik, sehingga mendapat kepercayaan masyarakat (Stirilita & Andayani, 2021). Berdasarkan hasil pengolahan data, OPD Kabupaten Tegal sudah selalu tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat, dan setiap instansi sudah sesuai dengan visi, misi, dan strategi instansi. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori *stewardship* bahwa pemerintah selaku *steward* termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi sehingga dapat memperkuat kepuasan *principal*. Melalui *good governance* akan menciptakan kinerja keuangan yang baik, sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Temuan ini searah dengan peneliti Pramita dan Dharma (2018), Stirilita dan Andayani (2021), dan Agustiningtyas *et al.* (2020). Kemudian temuan ini tidak didukung oleh Sholohah *et al.* (2019) dan Ardianti (2018) yang menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pada OPD Kabupaten Tegal pengelolaan keuangan tetap berjalan lancar walaupun pegawai yang mengelola keuangan tidak semuanya mempunyai kompetensi untuk mendukung aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aparatur dapat menginterpretasikan dan merealisasi standar akuntansi dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan dengan baik. Para penyusun laporan keuangan tidak harus dilatar belakangi oleh pendidikan akuntansi/keuangan untuk memahami SAP. Dalam kondisi riil untuk menyusun laporan keuangan, setiap OPD menggunakan sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual sehingga hasil akhir laporan diperoleh dengan menginput transaksi dan penggunaan sistem aplikasi tersebut tidak memerlukan SDM yang berkompeten. Hal tersebut dibuktikan dari hasil statistik deskriptif

yang menunjukkan jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan yaitu sebesar 42% lebih sedikit dari latar belakang pendidikan lainnya yakni 58%. Hasil penelitian ini berlawanan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajemen atau SDM akan termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan mereka dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan yang berkualitas. Kenyataannya SDM tidak termotivasi untuk selalu meningkatkan kompetensinya untuk mencapai pemahaman yang lebih mengenai SAP.

Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi SDM dalam penelitian ini tidak terbukti secara empiris dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara SPI dengan kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa berkompeten atau tidaknya SDM tidak dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu cara untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan diterapkannya sistem pengendalian yang efektif (Leatemia & Ely, 2021). Walaupun tidak didukung dengan SDM yang berkompeten, apabila pengendalian internal dapat diimplementasikan dengan baik pada OPD maka akan berakibat pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan tanggung jawab OPD Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga keakuratan saat menginput dan memposting data keuangan adalah hal yang *basic* dalam menjaga kualitas penyajian laporan keuangan suatu OPD. Penelitian ini bertentangan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan SDM tidak termotivasi oleh kepentingan individu melainkan fokus untuk hasil untuk kepentingan organisasi. SDM dalam penelitian ini tidak terdorong untuk meningkatkan kompetensi untuk memahami dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian agar menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SDM yang berkompeten setiap instansi mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik, karena kompetensi SDM merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pemberian pelayanan publik yang efektif bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan bukti dari hasil penelitian bahwa setiap OPD sudah menyajikan laporan secara akurat. Penelitian dibuktikan dengan hasil kuesioner yang menyatakan setiap OPD Kabupaten Tegal sudah menyajikan laporan keuangan secara akurat, dimana penyusunan laporan yang akurat didukung oleh tata kelola yang baik dan SDM yang berkompeten dalam bidang akuntansi/keuangan. Kehadiran SDM yang berkompeten dalam penerapan *good governance* diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari kesalahan penyajian yang tidak sesuai dengan standar serta terbebas dari kesalahan interpretasi. Hasil penelitian ini searah dengan teori yang digunakan, yaitu teori *stewardship*, dimana SDM terdorong oleh kepentingan organisasi untuk mewujudkan *good governance* dan memberikan pelayanan publik yang baik, salah satunya dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. SAP, efektivitas SPI, dan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

2. Kompetensi SDM tidak mampu memoderasi pengaruh SAP dan efektivitas SPI terhadap kualitas laporan keuangan
3. Kompetensi SDM mampu memoderasi pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, saran yang dapat diberikan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Tegal senantiasa memperbarui SAP, mengoptimalkan efektivitas SPI, dan mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip *good governance* sehingga dalam mengelola keuangan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pegawai yang bekerja pada bidang keuangan sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan, karena SDM yang berkompoten sangat diperlukan agar dapat bekerja lebih maksimal dalam merealisasikan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan akuntansi jika memang itu dibutuhkan, karena kompetensi SDM terbukti dapat memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Laporan keuangan yang telah diaudit harus rutin dipublikasikan pada *website* resmi pemerintah daerah agar menciptakan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah pemerintah Kabupaten Tegal

Saran bagi peneliti berikutnya yaitu:

1. Diharapkan bagi peneliti berikutnya dapat meluaskan variabel-variabel yang lebih beragam karena dalam penelitian ini *R-Square* hanya sebesar 51%, sehingga masih banyak variabel yang masih jarang untuk diteliti yang diduga dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. Peneliti berikutnya dapat memperluas objeknya menggunakan penelitian permasing-masing OPD dengan jumlah tertentu secara proporsional.
3. Saat penyebaran angket/kuesioner lebih baik menggunakan sistem *online*, karena akan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, W., & Hartono, J. (2015). *Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*.
- Agustiningtyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pada Opd Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Ardianti, E. P. (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(2), 54–69.
- Aryanti, N., & Wahyuningrum, I. F. S. (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1–18.
- Arza, O., Syafitri, Y., & Meyla, D. N. (2021). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang. *Pareso Jurnal*, 3(3), 519–542.
- Aswar, K., Wiguna, M., Hariyani, E., & Ermawati, E. (2021). Quality of Financial Statements in Indonesian Local Governments: An Empirical Investigation. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 993–999. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0993>

- BPK RI. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020*.
- BPK RI. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*.
- BPKAD. (2022). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal*. Keuangan Daerah Kab Tegal. <https://keuangandaerah.tegalkab.go.id/>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Dewi, N. F., Azam, F., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors Influencing the Information Quality of Local Government Financial Statement and Financial Accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013>
- Dewi, R., & Hoesada, J. (2020). The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of Information Technology On Quality Of Financial Statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies*, 7(1), 4–10. <https://doi.org/10.35310/jass.v1i02.243>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Farikhoh, I., & Kusmuriyanto. (2019). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memoderasi Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah. *Economic Education Analysis Journal (EEAJ)*, 2(1), 1–18.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS) Dilengkapi Software Smart PLS 3.0. Xlstat 2014 dan WarPLS 4.0 (Edisi 4)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, F., Erlina, & Rini, E. S. (2019). Factors That Affect The Quality of The Government's Financial Statements In Medan. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 3(1), 139–152.
- Hendri, & Amelia, S. (2019). The Influence of Human Resources, and Internal Control on the Quality of Financial Statement: Accounting Information System as a Moderating Role. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 6(10), 761–769. www.ijmae.com
- Husna, N., Rasyidin, M., & Zairinah, A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(2), 107–114. <http://ejournalstielhokseumawe.com/ojs3/index.php/jaktabangun/article/view/31>
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Jannah, M. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Sarana Prasarana Pendukung terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empris pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul). In *repository.umy.ac.id*.

- Leatemia, S. Y., & Ely, Y. I. (2021). Pengaruh Efektivitas SIA dan SPI Terhadap Kualitas LKPD Dimoderasi Oleh Kualitas SDM. *Jurnal SOSOQ*, 9(1), 1–12.
- Maramis, M. M., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 563–570. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20685.2018>
- Philadelphphia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i1.777>
- Pramita, I. I. G. A. A., & Dharma, S. I. D. G. (2018). Effect of Application of Good Governance, Government Accounting Standards and Apparatus on Quality of Financial Statements. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 6(78), 355–362.
- Radartegal.com. (2021). *Selamat! Pemkab Tegal Meraih Opini WTP dari BPK yang ke Lima*. [Www.Radartegal.Com](https://www.radartegal.com). <https://radartegal.com/selamat-pemkab-tegal-meraih-opini-wtp-dari-bpk-yang-ke-lima.16597.html>
- Redaksi. (2018). *Dapat Opini WTP, Bukan Jaminan Bebas Penyimpangan*. [Www.Radarbanten.Com](http://www.radarbanten.com). <https://www.radarbanten.co.id/dapat-opini-wtp-bukan-jaminan-bebas-penyimpangan/>
- Septarini, D. F., & Papilaya, F. (2016). Interaksi Komitmen Organisasi terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), 100–116. <https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.506>
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.32400/iaj.26622>
- Stirilita, F. A., & Andayani. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4363/4374>
- Sumaryati, A., Novitasari, E. P., & Machmuddah, Z. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.n10.795>
- Widya, P. (2017). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Bungo). *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*, 12(2), 82–103.
- Yaya, R., & Pawestri, D. C. N. (2020). The Quality of Local Government Financial Statement and Its Determinant Factors. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 176(ICoSIAMS 2020), 291–297. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.040>